

BAB II

Kajian Pustaka dan Landasan Teori

2.1 Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu memberikan hasil gambaran bagi penulis mengenai topik permasalahan dan pendekatan analisis yang digunakan. Tidak hanya itu, penelitian terdahulu berguna untuk memberikan informasi yang masih kurang sehingga akan memunculkan unsur pembaharuan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian telah dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Variabel yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muhuk, Wima Yudha Prasetyo (2019)	a. PDRB per kapita b. PAD(Pendapatan Asli Daerah) c. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) d. DAU (Dana Alokasi Umum)	Regresi Berganda	PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya karena tidak memenuhi syarat dalam asumsi klasik.
2.	Muhammad Ilham & Evita Hanie Pangaribowo (2017)	a. IPM (Indek Pembangunan Manusia) b. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) c. Kontribusi sektor pertanian & manufaktur	Regresi panel & ArcGis 2017	Berdasarkan perhitungan Intropy Theil diketahui sebagian besar provinsi di Indonesia tergolong dalam ketimpangan tinggi (berdasarkan nilai median dari 34

		<ul style="list-style-type: none"> d. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) & e. PMA (Penanaman Modal Asing) 		<p>provinsi) sedangkan IPM, TPT, dan kontribusi sektor manufaktur berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan Indonesia</p>
3.	Wiyang Mahakso (2013)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekonomi b. Pengeluaran pemerintah c. Panjang jalan d. Partisipasi sekolah e. Tingkat kemiskinan 	Regresi panel	<p>Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, panjang jalan dan partisipasi sekolah mempengaruhi ketimpangan pembangunan sedangkan tingkat kemiskinan tidak mempengaruhi.</p>
4.	Bakri, Syahrizal, dan Hasdi Aimon (2016)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekonomi b. Investasi c. Tenaga kerja d. Dana perimbangan 	Regresi berganda	<p>Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan sedangkan Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.</p>
5.	Nurhuda R (2013)	<ul style="list-style-type: none"> a. PDRB per kapita b. Pendapatan asli daerah c. Dana alokasi umum d. Indeks pembangunan manusia 	Regresi berganda & SPSS	<p>Pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan PDRB per kapita dan dana alokasi umum tidak diketahui pengaruhnya</p>

				dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam asumsi klasik.
6.	Ginting, A. M. (2014)	PDRB per kapita Investasi aglomerasi	Regresi panel data	PDRB per kapita dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan aglomerasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menganalisis ketimpangan pembangunan dengan faktor ekonomi dan non ekonomi dengan objek penelitian Indonesia berdasarkan 34 provinsi. Tujuan penelitian yakni sesuai dengan data BPS, bahwa terjadi ketimpangan antar Indonesia Bagian Barat yang meliputi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera sedangkan Indonesia Timur meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. penelitian ini sangat relevan, karena perbedaan geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang berbeda setiap daerah akan mempengaruhi ketimpangan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ginting, A. M. (2014) dan Ilham, M., & Pangaribowo, E. H. (2017) menggunakan faktor ekonomi untuk menganalisis ketimpangan pembangunan Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Ginting, A. M (2014) dan

Ilham, M., & Pangaribowo, E. H. (2017) yakni Ketimpangan per Provinsi, Investasi per Provinsi, Laju Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi dan Industri. Untuk adanya unsur kebaruan (*novelty*), maka penulis memunculkan variabel non ekonomi yaitu Listrik (kapasitas yang dipakai setiap Provinsi) untuk mewakili faktor infrastruktur publik dan analisis Ketimpangan dengan metode Indeks Williamson.

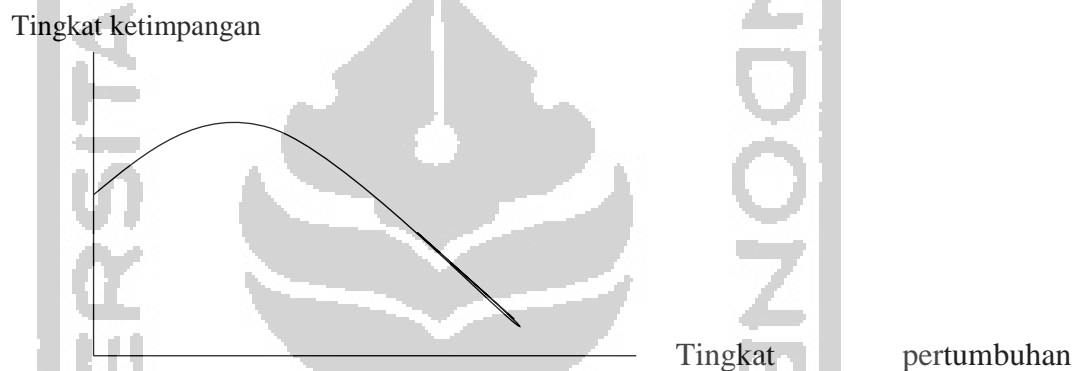
2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Menurut Wahyudi (2004) dalam kehidupan ekonomi, ketimpangan dilaporkan terus meningkat, baik dalam negara (*within states*) maupun antar negara (*between states*). Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda

Permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dengan menggunakan Hipotesa model Neo-Klasik. Model tersebut menjelaskan proses pembangunan baru dimulai (negara yang sedang berkembang), tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah (*regional disparity*) cenderung menjadi tinggi (*divergence*). Ketika proses pembangunan telah berjalan dalam waktu yang lama maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun.

Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa negara-negara sedang berkembang umumnya tingkat ketimpangan pembangunan antar daerahnya cenderung lebih tinggi, dibandingkan pada negara maju ketimpangannya lebih rendah. Secara lebih lanjut, menurut Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) Dengan kata lain kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk U terbalik (*Reverse U-shape Curve*)



Gambar 2.1
Kurve “U” Terbalik (Hipotesis Kuznet)

2.2.2. Indeks Williamson

Model analisis yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah berdasarkan tingkat disparitas pendapatannya. Dimana bila indeks mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila indeks mendekati nol berarti merata. Williamson (1965), mengemukakan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (Tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan suatu negara pada waktu tertentu.

Rumus Indeks Williamson:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}}$$

Dimana : V_w : Indeks Williamson

Y_i : PDRB per Provinsi seluruh Indonesia

Y : PDRB per kapita Provinsi seluruh Indonesia

F_i : Jumlah penduduk per Provinsi seluruh Indonesia

I : Wilayah

n : Jumlah Proporsi penduduk seluruh Indonesia

Untuk mengukur ketimpangan Ekonomi (pendapatan) antar Provinsi

Williamson IW berkisaran antara 0-1

a. Bila $V_w < 0,3$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah rendah

b. Bila $V_w, 0,3-0,5$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah sedang

c. Bila $V_w, >0,5$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah tinggi

Sedangkan indeks ketimpangan pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai dengan angka 1 atau $0 < V_w < 1$. Semakin mendekati 0 berarti ketimpangan semakin rendah dan semakin mendekati 1 berarti ketimpangan semakin lebar.

2.2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro,2005). Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan menjadi daya tarik bagi

investor untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi di daerah tersebut, sehingga akan meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan sehingga menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak dan ketimpangan antar wilayah menurun (Ma'ruf, A., & Wihastuti, L, 2008).

Tetapi apabila laju pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada daerah-daerah pusat pertumbuhan saja maka *trickle down effect* (dampak penetesannya kebawah) yang akan sulit untuk tercapai (Fitriyah, L, 2013). PDRB sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kondisi laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam periode tertentu, jika PDRB daerah meningkat artinya upaya pembangunan nasional melalui pertumbuhan ekonomi berhasil (Suliswanto, 2010).

2.2.3.1. Model Pertumbuhan Neo Klasik

Model Neo Klasik Solow (*solow neoclassical growth model*) menyatakan bahwa berbagai perekonomian akan terpusat pada kondisi tertentu ke tingkat pendapatan yang sama. Kondisi tersebut akan tercapai jika, perekonomian memiliki kesamaan dalam tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan produktivitas. Sedangkan menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan *output* di peroleh dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu:

1. Akumulasi Modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, pendidikan, dan keterampilan kerja.
2. Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan angkatan kerja (*labour force*)

3. Kemajuan teknologi, cara penyelesaian secara efektif dalam menyelesaikan tugas.

Sehingga, bisa dituliskan dalam rumus sebagai berikut :

$$Q = f(C, L)$$

Keterangan:

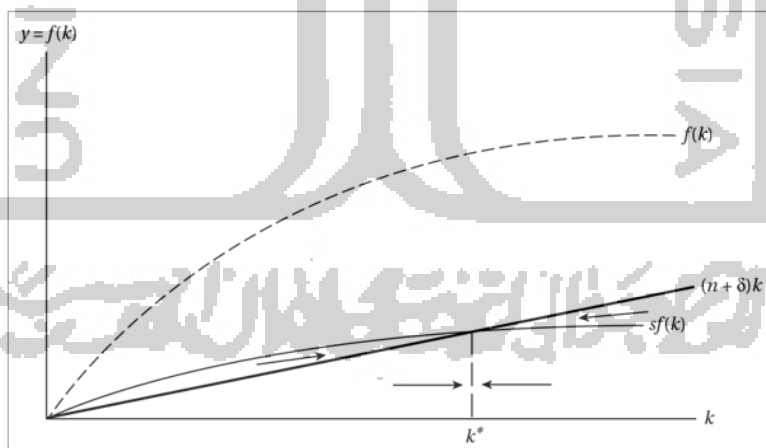
Q = Jumlah output yang dihasilkan

f = Fungsi

C = Capital (modal sebagai input)

L = Labour (tenaga kerja, sebagai input)

Dimana *Output* (Q) merupakan fungsi dari modal (C) dan Labour (L). artinya tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengkombinasikan modal dan tenaga kerja (Todaro & Smith, 2011 : 170). Equilibrium dalam Model



Pertumbuhan Solow dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Todaro & Smith. : 178

Gambar 2.2

Ekuilibrum dalam Model Pertumbuhan Solow

Model Neo Klasik sebagai model pertumbuhan ekonomi menganalisis bagaimana keterkaitan antara akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan teknologi terhadap tingkat produksi *output*. Model ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya fungsi dari tenaga kerja dan modal secara terpisah maka kedua faktor tersebut hasilnya akan konstan (tetap) secara bersama-sama. Sedangkan kemajuan teknologi menjadi faktor yang bersifat residu artinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (*decreasing returns to capital*). Sedangkan pertumbuhan angkatan kerja ditentukan secara eksogen (dari luar) artinya bebas dari faktor-faktor pengaruh lainnya dari model.

2.2.3.2. Model Harrod-Domar

Salah satu strategi utama pembangunan yang diperlukan untuk mobilisasi tabungan dalam negeri ataupun luar negeri yaitu untuk menghasilkan investasi yang cukup guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara lebih spesifik, menyatakan bahwa dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau positif akan berkaitan dengan rasio tabungan (Semakin besar GDP perekonomian yang dapat ditabung dan diinvestasikan, semakin besar pula pertumbuhan GDP). Berbanding terbalik atau negatif berkaitan dengan rasio modal output perekonomian (semakin tinggi C , semakin rendah pula pertumbuhan GDP). Sehingga dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\Delta y}{x} = \frac{s^G}{c} - \delta$$

Dimana δ adalah tingkat penyusutan modal (*Capital depreciation rate*).

Selain investasi, dua komponen lain dalam pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja dan teknologi. Dalam kaitannya dengan model Harrod-Dommar, pertumbuhan tenaga kerja tidak diuraikan secara eksplisit, hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja diasumsikan sebanding dengan modal yang diinvestasikan (asumsi tersebut tidak selamanya benar).

Dalam kaitannya dengan model Harrod-Dommar, secara umum dapat dikemukakan bahwa kemajuan teknologi dapat dijelaskan sebagai penurunan rasio modal output yang diperlukan. Sehingga pertumbuhan akan lebih besar dalam tingkat investasi, dalam jangka panjang sifatnya tidak tetap tetapi dapat berubah sewaktu-waktu sehingga kegunaan terhadap pasar keuangan dan lingkungan kebijakan sangat berpengaruh.

2.2.4. Investasi

Investasi merupakan salah satu sumber utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas penanaman modal dalam negeri ataupun luar negeri secara konsisten akan menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal akan berdampak pada peningkatan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, hasilnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran atau belanja penanam modal untuk membeli barang-barang modal bertujuan untuk menambah produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2008 : 122). Secara

garis besar, investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian. Setiap negara membuat kebijakan yang dapat mengundang investor dalam menanam modalnya di negara tersebut.

2.2.4.1. PMA (Penanaman Modal Asing)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 9 tentang penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam dalam negeri.

PMA memiliki dampak positif terhadap peningkatan keuntungan sebuah proses produksi transfer teknologi, pengenalan teknologi dalam proses produksi baru, pelatihan tenaga kerja, dan akses ke jaringan internasional (Effendi & Soemantri, 2003) serta memberikan *efek multiplier* yang tinggi dalam penyerapan tenaga kerja terampil dan tenaga kerja khusus (Latip, 2009; Prasaja 2013).

Kondisi tersebut menyebabkan tingginya produktivitas ekonomi di daerah sekaligus mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut secara langsung menimbulkan ketimpangan yang tinggi antar daerah di Indonesia (Kurniawan & Sugiyanto, 2013; Yusuf, 2013).

2.2.4.2. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 Ayat 2 menyebutkan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri menggunakan modal dalam negeri.

Investasi akan mendorong produktivitas ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan. Perbedaan investasi di Indonesia akan meningkatkan ketimpangan pembangunan ekonomi. Tetapi dalam jangka panjang, investasi akan dapat menurunkan tingkat ketimpangan apabila terjadi pemerataan investasi di Indonesia masing-masing daerah di Indonesia. Menurut Sadono (1994) dalam Krinantiya (2014) jumlah investasi bergantung pada beberapa hal diantaranya besarnya keuntungan yang diperoleh dalam suatu kegiatan ekonomi, suku bunga, tingkat keuntungan dimasa depan, ramalan keadaan ekonomi di masa depan, dan penggunaan teknologi.

2.3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan regional. Infrastruktur mempunyai peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, semua negara berkembang selama satu dekade terakhir berlomba-lomba memperbaiki infrastruktur untuk mendongkrak pembangunan ekonominya (Barus, 2012).

Hal tersebut menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan

perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia (Suratno dalam Sumadiasi, 2016)

2.3.1. Listrik

Infrastruktur listrik merupakan energi yang penting, listrik digunakan untuk bermacam-macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya listrik maka aktivitas menjadi terhambat baik dalam perekonomian maupun dalam sosial. Hal ini menjadi peranan penting dalam memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah, ketika sumber daya listrik terpenuhi diseluruh wilayah maka akan meningkatkan produktivitas produksi barang dan jasa, sosial ekonomi, dan konsumsi yang pada akhirnya akan memperkecil ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

2.4. Sektor Industri

Industri merupakan kegiatan produksi dimana terjadinya perubahan barang mentah menjadi barang yang bernilai. Besarnya kontribusi sektor industri disebabkan *output* dari proses produksi merupakan barang yang dapat di perdagangkan dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Harapannya ketika sektor industri baru berkembang terpusat dari lokasi daerah yang berdekatan akan menjadikan aglomerasi industri. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan lapangan pekerjaan semakin luas juga akan mengurangi ketimpangan (Silalahi, 2014).

2.3 Hipotesis Penelitian

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia.
2. Investasi berpengaruh dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia.
3. Jumlah Industri berpengaruh dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia.
4. Distribusi Listrik berpengaruh dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia.

2.4 Kerangka Konseptual

